BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia disuatu wilayah. Indikator yang bisa mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat pembangunan manusia yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Alat ukur ini diluncurkan oleh Mahhub ul Haq dalam bukunya yang berjudul Reflections on Human Development (1995). dan disepakati dunia melalui United Nation Development Programe (UNDP). Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain, Usia harapan hidup (kesehatan). Merupakan indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia seperti angka kematian bayi, rata-rata penduduk yang sakit, presentase penduduk sakit, presentase kelahiran bayi yang di bantu tenaga medis. Pengetahuan (pendidikan). Merupakan faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia indikator Pengetahuan (pendidikan) antara lain rata-rata lama waktu bersekolah, angka anak putus sekolah, dan sebagainya. Standar hidup layak (ekonomi). Merupakan faktor yang mempengaruhi Indek Pembangunan Manusia indikator standar hidup layak antara lain jumlah penduduk yang bekerja , jumlah

penduduk miskin, jumlah pengangguran terbuka,dan sebagainya. Berikut disajikan data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/KotaDiSumateraBaratTahun2016-2020

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kab.KepulauanMentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
Kab.PesisirSelatan	68.39	68,74	69,4	70,08	69,9
Kab.Solok	67,67	67,86	68,6	69,08	69,08
Kab.Sijunjung	66,01	66,6	66,97	67,66	67,74
Kab.TanahDatar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
Kab.PadangPariaman	68,44	68,9	69,71	70,59	70,61
Kab.Agam	70,36	71,1	71,7	72,37	72,46
Kab.LimaPuluhKota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
Kab.Pasaman	64,57	64,94	65,6	66,46	66,64
Kab.Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
Kab.Dhamasraya	70,25	70,4	70,86	71,52	71,51
Kab.PasamanBarat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
KotaPadang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
KotaSolok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
KotaSawah Lunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
KotaPadang Panjang	76,5	77,01	77,3	78	77,93
KotaBukitTinggi	79,11	79,8	80,11	80,71	80,58
KotaPayakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,9
KotaPariaman	75,44	75,71	76,26	76,7	76,9
ProvinsiSumbar	**70,73**	**71,24**	**71,73**	**72,39**	**72,38**

Sumber: BPSSumbar

Berdasarkan tabel 1.1 Perbandingan antar wilayah tidak berhenti pada variasi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peringkatnya, tetapi dapat pula dibandingkan tingkat kemajuan melalui presentase pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah dicapai sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi pada tahun 2020 di Kota Padang sebesar 82,82 selanjutnya di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2020 sebesar 80,58 dan Kota Payakumbuh pada tahun

2020 sebesar 78,90. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah terjadi di Kab Kepulauan Mentawai pada tahun 2016 sebesar 58,27. Gambaran perbandingan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang dengan Kab Kepulauan Mentawai menjadi sebuah perbandingan yang kontras. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup lebar, tingginya Indeks Pembangunan Manusia disebabkan karena menjadi pusat ekonomi dan pendidikan serta akses layanan kesehatan yang terjangkau dan yang terendah disebabkan karena keberadaan fasilitas kesehatan,pendidikan, infrastruktur penunjang ekonomi yang belum terbangun merata dan kurangnya tempat tinggal yang layak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya perekonomian suatu daerah adalah tingginya tingkat kemiskinan. Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata ‘’Miskin’’ yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2012) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan ***(proverty line)*** atau disebut juga batas kemiskinan **(*poverty treshold).***

Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.

Kemiskinan merupakan suatu masalah krusial yang hampir dialami oleh seluruh negara di dunia. Secara umum definisi kemiskinan dapat diartikan, sebagai ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Amartya Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidak

mampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak. Berikut disajikan data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Ribu Jiwa) Tahun 2016-2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
SumateraBarat	**371,55**	**364,51**	**357,13**	**348,22**	**344,23**
Kab.KepulauanMentawai	13,09	12,95	12,99	13,22	13,37
Kab.PesisirSelatan	35,86	35,53	34,92	36,51	35,46
Kab.Solok	34,06	33,33	32,89	29,74	29,28
Kab.Sijunjung	17,12	16,83	16,55	16,65	16,28
Kab.TanahDatar	19,63	19,27	18,48	16,20	15,34
Kab.PadangPariaman	36,34	34,70	33,20	29,48	28,98
KabAgam	37,55	36,57	32,92	33,10	33,31
Kab.LimaPuluhKota	28,57	26,93	26,47	26,64	26,43
Kab.Pasaman	20,83	20,38	20,31	20,22	20,29
Kab.Solok Selatan	11,91	11,89	11,85	12,49	12,39
Kab.Dharmasraya	16,24	15,63	15,42	15,49	15,70
Kab.PasamanBarat	30,76	30,84	31,83	31,53	31,64
KotaPadang	42,56	43,75	44,04	42,44	42,17
KotaSolok	2,59	2,50	2,29	2,29	1,99
Kota.Sawahlunto	1,34	1,23	1,48	1,35	1,36
Kota.PadangPanjang	3,47	3,22	3,11	3,00	2,84
Kota.Bukittinggi	6,81	6,75	6,32	6,00	6,01
Kota.Payakumbuh	8,35	7,72	7,69	7,68	7,74
Kota.Pariaman	4,47	4,49	4,40	4,20	3,66

Sumber: BPSSumbar

Berdasarkan tabel 1.2 Perbandingan jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang paling tinggi yaitu Kota Padang sebesar 44,04 pada tahun 2018 selanjutnya Kab.Agam sebesar 37,55 pada tahun 2016 dan di ikuti Kab.Pesisir Selatan sebesar 36,51 pada tahun 2019.Dan sebaliknya jumlah penduduk miskin terkecil yaitu Kota.Sawah Lunto sebesar 1,23 pada tahun 2017 selanjutnya Kota.Solok sebesar 1,99 pada tahun 2020 dan Kota.Padang Panjang sebesar 2,84 pada tahun 2020. Sedangkan data dari keseluruhan Provinsi

Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan.Fenomena ini menyebabkan kemiskinan bermuara dari teori lingkaran setan ,yang menyatakan bahwa produktivitas yang rendah mengakibatkan tingkat kemakmuran ekonomi daerah rendah dan akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi supaya bisa mengatasi masalah kemiskinan penduduk di suatu daerah digunakanlah koefisien gini (Gini Ratio) adalah alat untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan)

Indeks Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan kemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (complete inequality atau perfectly inequal), dimana seluruh penduduk terpusat di wilayah tertentu. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar pula kemungkinan ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi.

Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang diukur dengan membandingkan luas yang dibentuk antara diagonal dan Kurva Lorenz (distribusi pendapatan) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Daimon dan Thorbecke (1995:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. 1) variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. 2) merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Berikut disajikan data Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.3
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

Wilayah	Gini Rasio				
	2016	2017	2018	2019	2020
SumateraBarat	0,33	0,318	0,321	0,306	0,305
Kab.Kep.Mentawai	0,31	0,319	0,306	0,336	0,273
Kab.PesisirSelatan	0,27	0,299	0,255	0,246	0,264
Kab.Solok	0,31	0,294	0,303	0,285	0,277
Kab.Sijunjung	0,33	0,333	0,3	0,293	0,269
Kab.TanahDatar	0,3	0,262	0,288	0,278	0,273
Kab.PadangPariaman	0,26	0,28	0,296	0,297	0,257
Kab.Agam	0,29	0,279	0,257	0,251	0,278
Kab.LimaPuluhKota	0,27	0,262	0,283	0,238	0,222
Kab.Pasaman	0,3	0,26	0,266	0,33	0,31
Kab.Solok Selatan	0,31	0,299	0,309	0,295	0,307
Kab.Dharmasraya	0,3	0,252	0,264	0,278	0,28
Kab.PasamanBarat	0,31	0,286	0,29	0,283	0,258
KotaPadang	0,35	0,338	0,344	0,312	0,312
KotaSolok	0,34	0,299	0,296	0,271	0,286
KotaSawahlunto	0,32	0,299	0,31	0,289	0,3
KotaPadang Panjang	0,38	0,3	0,29	0,322	0,394
KotaBukittinggi	0,33	0,313	0,337	0,267	0,265
KotaPayakumbuh	0,34	0,303	0,302	0,276	0,325
KotaPariaman	0,34	0,301	0,316	0,3	0,31

Sumber:BPSsumbar

Berdasarkan Tabel 1.3 Perbandingan antara wilayah menurut Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tertinggi yaitu Kota Padang pada tahun 2017 sebesar 0,338 selanjutnya di ikuti Kota Bukit Tinggi pada tahun 2018 sebesar 0,337 dan Kab Kepulauan Mentawai pada tahun 2019 sebesar 0,336. Sebaliknya Gini Rasio terendah Kab Sijunjung pada tahun 2018 sebesar 0,3 selanjutnya Kab Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar 0,3 dan Kab Dhamasraya pada tahun 2016 sebesar 0,3 Kota Padang panjang pada tahun 2017 juga memiliki Gini Rasio sebesar 0,3 dari tabel di atas dapat dilihat ada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki Gini Rasio yang sama tetapi beda tahun nya. Berdasarkan data di atas gini rasio bersifat fluktuasi yang artinya nilai gini rasio mengalami naik turun pada setiap tahun ini disebabkan adanya perbedaan pendapatan daerah pada tahun yang berbeda. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa

untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah guna meningkatkan pendapatan daerah maka digunakanlah PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah regional atau provinsi dalam kurun waktu satu tahun tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB menurut **harga berlaku** digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB **harga konstan** digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.Berikut disajikan data PDRB menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Wilayah	Laju Pertumbuhan (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
SumateraBarat	5,27	5,3	5,16	5,05	-1,60
KepulauanMentawai	5,02	5,12	4,91	4,76	-1,85
PesisirSelatan	5,33	5,41	5,35	4,81	-1,11
Kab.Solok	5,31	5,32	5,22	5,07	-1,12
Sijunjung	5,26	5,26	5,09	4,83	-1,10
TanahDatar	5,03	5,11	5,07	5,01	-1,13
PadangPariaman	5,52	5,58	5,46	2,51	-10,46
Agam	5,51	5,51	5,26	4,81	-1,38
LimaPuluhKota	5,32	5,53	5,26	5,10	-1,16
Pasaman	5,07	5,08	5,00	4,84	-0,87
SolokSelatan	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24
Dharmasraya	5,42	5,44	5,31	4,98	-1,39
PasamanBarat	5,34	5,34	5,24	4,49	-1,34
Padang	6,17	6,23	6,09	5,68	-1,86
KotaSolok	5,76	5,76	5,68	5,53	-1,42
Sawahlunto	5,72	5,74	5,52	5,34	-1,27
PadangPanjang	5,8	5,8	5,73	5,59	-1,44
Bukittinggi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74
Payakumbuh	6,08	6,12	6,05	5,92	-1,66
Pariaman	5,59	5,61	5,50	5,33	-1,32

SumberBPSSumbar

Berdasarkan tabel 1.4 Perbandingan antara wilayah menurut Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tertinggi yaitu Kota Padang pada tahun 2017 sebesar 6,23 selanjutnya di ikuti Kota Payakumbuh pada tahun 2017 sebesar 6,12 dan Kota Bukit Tinggi pada tahun 2017 sebesar 6,08 . Sebaliknya PDRB yang terendah Kab Padang Pariaman pada tahun 2020 sebesar -10,46 selanjutnya Kota Padang pada tahun 2020 sebesar -1,86 dan Kab Kepulauan Mentawai pada tahun 2020 sebesar -1,85. Dari tabel di atas dapat di lihat terjadinya fruktuasi/naik turun nya PDRB di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang disajikan di atas hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia sangatlah erat, ketika Produk Domestik Regional Bruto pada suatu daerah tinggi maka hal itu menunjukkan bahwa pembangunan manusia pada daerah tersebut baik, jika pembangunan manusia baik maka Indekk Pembangunan Manusia di wilayah tersebut akan meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Gini Rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatra Barat?
4. Bagaimana pengaruh Kemiskinan, Gini Rasio dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Gini Rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan,Gini Rasio dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Sumatera barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, maka mamfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Hasil penelitian ini diharapkan bermamfaat untuk menambah Ilmu Pengetahuan di bidang ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.
2. Bagi Pemerintah, Memberikan gambaran yang jelas mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sehingga dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan Indeks Pembangunan Manusia.